



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Disampaikan oleh : Simon A.M Sitorus, S.IP.,M.IP

**Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2024**

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2024

Disampaikan oleh : SIMON A.M SITORUS, S.IP., M.IP

Bismillahirrahmanirrahim

- **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;**
- **Salam sejahtera bagi kita semua**
- **Om Shanti Astu Namu Budaya**
- **Salam Kebajikan, Rahayu**

Yang terhormat;

- Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Sekretaris Daerah dan para Pejabat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- Para Undangan, para Pengamat, dan Rekan-rekan Jumalis

MERDEKA !!!

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-NYA bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah dalam Forum yang terhormat ini Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari ASEAN ke 57 tahun yang jatuh bertepatan pada Hari ini Kamis Tanggal 8 Agustus 2024. Semoga Indonesia akan semakin kuat secara Geopolitik dan Mari bersama-sama kita wujudkan Negara-negara ASEAN yang kuat dan Hebat dalam Kancah dunia Global dengan terus menjaga persaudaraan dunia yang berperikemanusiaan dan perikeadilan, artinya terbebas dari segala bentuk Penjajahan dan Penindasan.

Yth, Pimpinan Rapat, Pj Gubernur, dan hadirin peserta rapat;

Merujuk pada pidato Pj. Gubernur dalam sidang Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyampaikan

bahwa total rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 85,47 Triliun** (*Delapan Puluh Lima Koma Empat Puluh Tujuh Triliun Rupiah*), naik sebesar 4,60% (*Persen*) dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 81,71 Triliun (*Delapan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Satu Triliun Rupiah*).

Pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 direncanakan sebesar **Rp. 75,22 Triliun** (*Tujuh Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Triliun Rupiah*) atau naik sebesar 3,83% (*Persen*) dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 72,44 Triliun** (*Tujuh Puluh Dua Koma Empat Puluh Empat Triliun Rupiah*). Sedangkan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 direncanakan sebesar **Rp. 76,29 Triliun** (*Tujuh Puluh Enam Koma Dua Puluh Sembilan Triliun Rupiah*) atau naik sebesar 5,09% (*Persen*) dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2024 yakni sebesar Rp. 72,60 Triliun (*Tujuh Puluh Dua Koma Enam Puluh Triliun Rupiah*) dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar **Rp 10,25 Triliun** (*Sepuluh Koma Dua Puluh Lima Triliun Rupiah*) dan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar **Rp. 9,17 Triliun** (*Sembilan Koma Tujuh Belas Triliun Rupiah*).

Secara rinci berikut Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 :

1. Dalam Hal Pendapatan Daerah yang direncanakan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas usaha Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah yang telah dilakukan, namun dalam realitas kondisi ekonomi yang semakin sulit yang diakibatkan oleh belum pulih sepenuhnya perekonomian nasional pasca Covid 19 dan Gejolak Perekonomian Global serta ancaman Perang dunia yang juga sangat berimbas terhadap ekonomi Nasional termasuk Nilai Tukar Rupiah yang semakin merosot tajam maka Fraksi PDI Perjuangan berharap Pajak Daerah tidak menjadi tambahan beban penderitaan bagi masyarakat

umum khususnya Golongan masyarakat menengah ke bawah di Provinsi Jakarta.

Mohon Tanggapannya.

2. Fraksi PDI Perjuangan masih melihat terjadinya pemborosan-pemborosan belanja daerah baik itu dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang dan Jasa, sebagai contoh Belanja Modal Tanah yang naik Rp 281,9 Miliar atau sebesar 57% dan belanja modal peralatan dan mesin yang naik Rp. 707 Miliar atau sebesar 31,9%. Jika saja Provinsi Jakarta mampu melakukan pengetatan dan penghematan Belanja daerah sangat dimungkinkan mampu memberikan pengalokasian anggaran yang lebih besar lagi bagi sektor sektor prioritas seperti Dalam bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan maupun pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan serta Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Betawi seperti Pembangunan Monumen Golok Cakung.

Mohon Tanggapannya

3. Tingkat akurasi pencatatan aset daerah merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Sebagai elemen penting dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah, akurasi pencatatan aset memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pendapatan daerah. Akurasi pencatatan aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, kami mendorong adanya inisiatif dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sistem pencatatan dan pengelolaan aset mereka.

Mohon Tanggapannya

4. Dalam kaitannya dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dalam upaya meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan Bisnis BUMD, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya langkah-langkah penyehatan bagi

BUMD. Penyehatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap BUMD beroperasi dengan efisien, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya menjauhkan praktik-praktik yang terjadi pada beberapa pengalaman sebelumnya, di mana terdapat kesan adanya pemberian perlakuan istimewa atau Meng-Anak Emaskan salah satu BUMD, yang bisa menimbulkan potensi kerugian bagi daerah dan tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, harus ada mekanisme pengawasan yang ketat dan kriteria kinerja yang jelas untuk setiap BUMD, agar seluruh sumber daya daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Mohon Tanggapannya

5. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap pada garis pembelaan terhadap *Wong Cilik* termasuk menekankan pada Program Prioritas Pembangunan, khususnya dalam aspek Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting. Inisiatif ini mencerminkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu fundamental yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Sebagai masukan yang konstruktif, kami juga mendorong dilakukannya pemetaan masalah di wilayah agar program yang dijalankan bisa tepat sasaran. Selain itu, kami menyarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah diterapkan, serta melibatkan lebih banyak pihak, termasuk komunitas dan organisasi non-pemerintah, dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mencapai sasaran dengan efektif dan efisien, tanpa terhambat oleh birokrasi atau hambatan lainnya. Dengan pendekatan kolaboratif dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan upaya penanggulangan

kemiskinan dan penurunan stunting di DKI Jakarta dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Mohon Tanggapannya

6. Fraksi PDI Perjuangan juga menaruh harapan besar terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pemukiman bagi warga Jakarta yang merupakan isu sentral dalam tata kelola perkotaan yang berkelanjutan serta menjadi kebutuhan penanganan persoalan pokok agraria yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Program Strategis Nasional (PSN) dalam bentuk reforma agraria sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018.

Kami juga mendorong Pemerintah Provinsi memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, mengurangi angka pengangguran juga sangat krusial, mengingat dampak langsungnya terhadap stabilitas sosial ekonomi dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar kedua aspek tersebut ditempatkan dalam skala prioritas Anggaran Belanja Daerah.

Dengan alokasi anggaran yang tepat dan efektif, diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merancang dan menerapkan program-program yang inovatif dan responsif untuk memenuhi kebutuhan pemukiman serta menciptakan lapangan kerja, sehingga membantu mengatasi masalah pengangguran di ibukota. Dalam konteks ini, kami juga menyarankan agar dilakukan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait, untuk memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Mohon Tanggapannya

7. Selama 2-3 Bulan terakhir Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan Bantuan Sosial Pendidikan Individu Seperti Penerima Manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU), Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang jumlahnya cukup signifikan yaitu sekitar 3 Ribu Penerima Manfaat KJMU dan 75 Ribu Siswa Penerima Manfaat KJP akan diputus secara bertahap dari tahun 2023, ketika ditelusuri maka penjelasan P4OP dengan Penjelasan Pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) ternyata tidak sama, satu sisi menyampaikan penjelasan dengan alasan karena terjadi pengurangan alokasi Anggaran di sisi yang lain menyampaikan penjelasan dengan alasan karena adanya pengalihan anggaran tersebut untuk program lainnya. Kami berterima kasih karena usulan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan anggaran KJMU dan juga KJP diakomodir sehingga dapat menguraikan permasalahan ini.

Masih dalam Bidang Pendidikan, Polemik pemutusan kontrak 107 Guru Honorer secara mendadak, sepihak dan tanpa solusi juga menjadi perhatian yang sangat serius dari Fraksi PDI Perjuangan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketersediaan dan sebaran tenaga pendidik di Jakarta masih belum terpenuhi, oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan justru berharap 4.127 Guru Honorer tersebut bisa diangkat statusnya ke dalam Kontrak Kerja Individu (KKI) Provinsi DKI Jakarta.

Mohon Tanggapan.

8. Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta telah melakukan serangkaian kunjungan lapangan dan interaksi diskusi dengan warga masyarakat, dan salah satu potret kebutuhan mendesak yang sering disuarakan adalah mengenai akses internet yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, fraksi kami merekomendasikan agar program Jak-Wifi, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas internet di Jakarta, dapat dilanjutkan pada Perubahan APBD tahun 2024 dengan target peningkatan layanan hingga minimal 1500 titik.

Selain itu, patut menjadi perhatian aneka ragam permasalahan nyata di tengah masyarakat yang belum terselesaikan seperti; Kebutuhan CCTV sebagai pendukung pengamanan Kampung, keluhan ijarah yang masih tertahan karena masalah biaya, kepastian tindak lanjut program PTSL sejak tahun 2018 yang masih tidak menentu hingga saat ini, rehabilitasi rumah bagi keluarga tidak mampu, penataan saluran air, kebutuhan air bersih terutama di musim kemarau seperti saat ini, penanganan bahaya kebakaran secara terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat (BUMN/PLN) karena selama ini kebakaran di Jakarta sering terjadi akibat korsleting listrik, dan permasalahan lainnya yang kerap muncul ketika kami melakukan reses.

Mohon Tanggapannya

Yth, Pimpinan Rapat, Pj Gubernur, dan hadirin peserta rapat;

Demikianlah tadi telah kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, sejuk, dan harmonis. Hal-hal lainnya yang Atas perhatian Pimpinan Rapat, Pj Gubernur, dan hadirin peserta Rapat, dengan ini kami sampaikan terima kasih, Semoga Allah Subhanahu Wata'ala/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tetap melindungi kita sekalian sehingga tetap sehat Wal'afiat.

Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan satu-dua bait pantun penambah semangat:

Makan siang di Warteg Gang Alpukat

Makan nya sebelahan sama Pak Yayat

Nyok kita bahas Perubahan APBD 2024

Ciptakan anggaran yang bermanfaat untuk rakyat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 8 Agustus 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



H. Prasetio Edi Marsudi, SH

Sekretaris,



Dwi Rio Sambodo. SE, MM

MERDEKA !!!



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**PIDATO PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Disampaikan Oleh :

BASTIAN P. SIMANJUNTAK, A.Md.

**JAKARTA,
KAMIS, 8 AGUSTUS 2024**

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Salam Sejahtera bagi kita semua;

Yang Terhormat ;

- **Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Saudara PJ. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota Forkopimda DKI Jakarta;**
- **Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**
- **Rekan-rekan Pers dan Hadirin Yang Saya Hormati;**

Salam Indonesia Raya;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai **Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.**

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Dari pidato penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh

saudara Pj. Gubernur pada Selasa, 7 Agustus 2024, maka berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan pokok-pokok pikiran yang menjadi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta;

Seperti yang telah ditetapkan saat awal penetapan APBD 2024, dimana ada 6 (enam) program prioritas yang akan berdampak langsung bagi publik, Fraksi Gerindra menyoroti diantaranya:

1. Terkait dengan Pemprov DKI Jakarta yang telah menganggarkan sebesar Rp 2,89 Triliun untuk menanggulangi potensi banjir di wilayah Jakarta, Fraksi Gerindra meminta agar kegiatan Normalisasi Sungai Ciliwung yang pelaksanaannya dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat telah terlaksana sepanjang 16 km, sehingga masih tersisa sepanjang 17 km lagi harus dipastikan terlaksana secara tuntas dengan proporsi anggaran yang lebih optimal. Fraksi Gerindra berharap normalisasi sungai ini nantinya dapat menuntaskan lebih dari 80% pada permasalahan banjir yang ada di Jakarta. **Mohon Tanggapan!**
2. Prioritas APBD DKI Jakarta Tahun 2024 juga berkenaan dengan penanganan kemacetan, dimana akibat pembangunan yang menggunakan badan jalan saat ini menimbulkan titik-titik kemacetan baru yang diperkirakan berlangsung lama. Oleh karenanya, Fraksi Gerindra berharap pada titik-titik kemacetan itu, harus ada petugas dalam membantu mengurai kemacetan tersebut. Fraksi Gerindra meminta penanganan kemacetan yang telah menjadi prioritas kegiatan di Tahun 2024 ini juga dibarengi dengan keikutsertaan perusahaan jasa transportasi

online. Dalam mengendalikan aktivitas pengemudi ojek online tersebut yang selama ini turut menyumbangkan persoalan macet di Jakarta dengan membangun banyak *shelter* sebagai titik jemput masyarakat pengguna jasa Ojol dimaksud. **Mohon Tanggapan!**

3. Terkait dengan adanya kegiatan pesta demokrasi Pemilukada Jakarta tahun 2024 ini, Fraksi Gerindra meminta agar bantuan anggaran berupa hibah kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPUD dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, harus dialokasikan juga untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi Petugas Penyelenggara *Adhoc* Pemilukada, seperti PPK, hingga KPPS, dan Panwascam hingga PPL. **Mohon Tanggapan !**
4. Lalu dalam rangka terselenggaranya Kota Jakarta yang aman, tertib dan nyaman, Fraksi Gerindra meminta agar ditambah titik-titik CCTV di pemukiman padat warga penduduk serta titik-titik rawan di seluruh wilayah Jakarta, mengingat jumlah CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seharusnya dibutuhkan secara ideal sebanyak 70.000-an titik. Sehingga banyaknya korban dari aksi kejahatan yang menjadi faktor Kota Jakarta sebagai kota yang tidak nyaman untuk di huni dapat diminimalisir. Di samping itu, Fraksi Gerindra meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dapat melakukan kolaborasi dengan para pihak pemilik CCTV swasta agar akses CCTV tersebut dapat terkoneksi bagi aktivitas pemantauan *command center* milik Pemprov DKI Jakarta. **Mohon Tanggapan!**
5. Terkait upaya peningkatan gizi atau asupan nutrisi bagi siswa lewat program makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini untuk

menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang dengan meletakkan dasar untuk gaya hidup lebih sehat, dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan anak sebagai prioritas utama. Ketika kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi, mereka akan lebih sehat dan belajar lebih baik. Oleh karenanya, Fraksi Gerindra mendorong agar dalam RAPBD Perubahan tahun 2024 ini yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. **Mohon Tanggapan !**

6. Berkenaan dengan pelayanan kesehatan, Fraksi Gerindra menilai selama ini banyak RSUD milik Pemprov DKI Jakarta belum melengkapi fasilitas alat kesehatan (Alkes) yang mumpuni, sehingga banyak pasien dirujuk ke rumah sakit swasta. Oleh karenanya, di setiap RSUD yang ada diperlukan penambahan sarana-prasana kesehatan yang lengkap serta ditunjang SDM/Tenaga Kesehatan melalui peningkatan penguasaan kecakapan dan keterampilan teknis yang menjamin kemampuan operator Alkes tersebut dalam mengoperasikan kegunaannya sekaligus perawatannya. **Mohon Tanggapan !**

7. Terkait data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, bahwa program Pembiayaan Makanan Tambahan (PMT) untuk balita tahun 2024 yang diperuntukkan untuk *weight faltering*, *Underweight*, Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Stunting dengan total anggaran sebesar Rp. 46.640.430.660,- (*empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah*). Fraksi Gerindra

meminta agar dapat dilakukan kajian secara komprehensif terhadap anggaran tersebut untuk memastikan penanganan stunting dapat dilaksanakan secara optimal. **Mohon Penjelasan !**

8. Terkait dengan Bantuan Sosial, sebagaimana yang Saudara PJ. Gubernur sampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun 2024, salah satunya adalah ditujukan memberikan Bantuan Sosial bagi komunitas sosial tertentu, dalam hal ini khususnya bagi upaya mengurangi dampak sosial. Sebagaimana diketahui, bansos dari dana APBD meliputi beberapa jenis sebagai upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) untuk penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, serta Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk anak usia nol sampai enam tahun, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Di dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 ini, tertera mengenai Belanja Bantuan Sosial pada penetapan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 3,14 triliun, sedangkan dalam RKUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2024 ini naik menjadi Rp. 3,49 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 382 miliar atau 12,29 persen. Usulan kenaikan anggaran tersebut menjadi pertanyaan dari kami, mengapa justru sebaliknya, realisasinya terjadi pengurangan pada jumlah penerima. Berikut ini kami berikan permasalahan yang ada di lapangan, misalnya di bawah ini:

- a. Mengenai Bansos Bagi Penerima KJP dan KJMU. Bahwa dalam Perubahan APBD Tahun 2024 akan diajukan sekitar Rp. 460 miliar khusus untuk KJP dan KJMU, namun di sisi lain terjadi pengurangan bagi penerima bantuan tersebut dengan alasan adanya penataan dan pemadanan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tepat sasaran. Juga dengan melihat Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Tahun 2023 juga dinyatakan bahwa: *"Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh verifikasi yang lebih selektif untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial KJP Plus dan KJMU, sehingga penyerapan khususnya untuk penerima baru kurang dari kuota yang dianggarkan"*. Kini sepanjang tahun 2024, banyak pengaduan warga Jakarta bahwa banyaknya siswa dan mahasiswa tidak memperoleh bantuan tersebut. Dengan demikian, terjadi pengurangan kepesertaan penerima Bansos KJP dan KJMU.
- b. Demikian juga pada Bansos Bagi Penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), adanya laporan dari Koalisi Nasional Pokja Disabilitas ke Dinas Sosial bahwa jumlah penyandang disabilitas di Cakung, Jaktim, mencapai 5.273 orang. Sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, disebut tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Penyandang disabilitas yang pernah menerima bansos hanya sekitar 550 orang atau 10 persen. Selain itu, ada 403 orang atau sebesar 8 persen penyandang

disabilitas yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), dan ada 107 orang atau sebesar 2 persen yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal ini sudah dibantah oleh Saudara Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta bahwa penyaluran bansos bagi penyandang disabilitas atau difabel di Jakarta itu terdapat 2.995 orang. Dari angka itu, 1.109 sudah menerima bantuan sosial. Meskipun sudah ada klarifikasi, namun data angka yang disampaikan oleh Saudara PJ Gubernur menunjukkan adanya penurunan angka. Oleh karena itulah, adanya pengurangan atau penurunan penerima manfaat atas Bantuan Sosial di lapangan tidak linier dengan rencana penambahan alokasi pada Perubahan Anggaran Belanja Bansos di Tahun 2024.

Mohon Tanggapan !

9. Bahwa dengan adanya pemadanan data kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Provinsi DKI Jakarta), dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan agar pemberian bansos telah sesuai dengan yang terdaftar di DTKS. Selain itu, Dinsos DKI Jakarta juga mengerahkan petugas untuk turun ke lapangan melakukan pendataan dan pendampingan sosial di tingkat kelurahan untuk memastikan secara langsung bahwa warga yang menerima bansos sesuai dengan DTKS, dan memenuhi syarat sesuai Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2020 tentang Variabel Khas Daerah untuk Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Mekanisme itu selanjutnya dimulai

dengan usulan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk disahkan ke Kemensos RI sehingga di DTKS memerlukan waktu yang panjang. Proses pendaftaran yang cukup panjang ini juga menjadi kendala bagi upaya pemenuhan hak-hak penerima manfaat bantuan tersebut. Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, dimana proses digitalisasi sudah dilakukan, mengapa masih ada kendala mengenai panjangnya permasalahan data ini. ***Mohon Penjelasan !***

10. Dalam rangka mendukung cita-cita Jakarta menuju Kota Global, pentingnya pada aspek peningkatan SDM melalui kegiatan pendidikan yang berkualitas menjadi yang terdepan dalam rangka menyiapkan Generasi Emas 2045 dan sekaligus menyambut Surplus Demografi yang dinantikan, serta memenuhi komitmen pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang di dalamnya menginstruksikan pelaksanaan Wajib Belajar hingga Pendidikan Menengah Universal yang berkualitas. Sehubungan dengan itulah, sudah waktunya di wilayah DKI Jakarta semua bangunan sekolahnya lebih layak dan didukung sarana pendidikan yang lebih baik. Mengingat masih banyaknya gedung sekolah yang rusak atau bahkan kumuh. Fraksi Gerindra akan terus mendorong agar Pemprov DKI Jakarta segera memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan jangan sampai terulang kejadian tahun lalu yang tidak terlaksana dengan alasan belum cukup waktu. Sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Tahun 2023 lalu, khusus pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan, dilihat dari realisasi Belanja Modal hanya terserap sebesar 81,63 persen

disebabkan kurang baiknya perencanaan dari anggaran yang tersedia. Hal inilah yang ikut mendasari pandangan Fraksi kami dengan melihat pembangunan ke depan kota Jakarta, bahwa di dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 ini, sudah tertera mengenai Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direncanakan mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 3,44 triliun pada penetapan APBD 2024 menjadi Rp. 3,69 triliun atau naik sebesar Rp. 246 milyar (7,16 persen). Ini membutuhkan komitmen dari pihak Eksekutif untuk bisa merealisasikannya sesuai perencanaan anggaran yang akan disetujui bersama. ***Mohon Tanggapan !***

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Pidato Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya dari seluruh pihak, baik dari Pimpinan dan sesama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pj. Gubernur selaku Pemerintah Provinsi beserta jajarannya di semua SKPD, Pemerhati, Wartawan, dan seluruh Pemangku kepentingan masyarakat kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, *Amin Ya Robal Alamin.*

Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum

warahmatullahi wabarakatuh

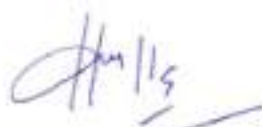
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Salam Indonesia Raya

Kamis, 9 Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Nurhasan, SE.

Sekretaris,



Esti Arimi Putri



PEMANDANGAN UMUM



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

Disampaikan Oleh :

Hj. Israyani, SP

**FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati **Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.**

Melalui forum Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS turut prihatin dan duka cita yang mendalam atas wafatnya Mantan Perdana Menteri Palestina, Ismail Haniyeh, dalam sebuah serangan di Teheran, Iran pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Semoga Allah merahmatinya dan terus menguatkan perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan sehingga terbebas dari penderitaan atas penjajahan Zionis Israel.

Seiring dengan semakin dekatnya hari kemerdekaan RI ke-79, Fraksi PKS mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun RI ke-79, semoga bangsa kita

semakin jaya dan bersatu dalam menjaga dan merawat NKRI. Marilah kita juga selalu mengenang jasa para pahlawan dan meneladani sikap juang pantang menyerah mereka.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas diajukannya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 ini yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya dan bisa disampaikan di akhir periode DPRD sekarang. Meskipun dalam waktu dua minggu ini kita harus membahas empat Ranperda yang hampir kesemuanya sangat penting bagi pembangunan Jakarta. Fraksi PKS berharap di akhir masa jabatan di periode ini, kita bisa membahas APBD Perubahan ini dengan semangat tinggi untuk menghasilkan formulasi APBD Perubahan 2024 yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, adil pemimpinnya dan sejahtera warganya.

Mencermati usulan rancangan APBD-P 2024 yang diajukan oleh eksekutif, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Perubahan APBD 2024 untuk lebih memaksimalkan penerimaan dan mempertajam penggunaan APBD bagi pembangunan Jakarta.

Pertama, dari sisi penerimaan, Fraksi PKS memberikan apresiasi pada akhirnya target dari penerimaan dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat bisa ditingkatkan cukup signifikan. Fraksi PKS sejak dulu meyakini bahwa pendapatan transfer terutama yang berasal dari dana bagi hasil pajak lebih tinggi dari yang selama ini ditargetkan. Jakarta merupakan pusat bisnis dan perekonomian nasional dan pusat industri jasa dan keuangan nasional. Hampir seluruh kantor pusat perusahaan-

perusahaan besar multinasional dan perwakilan perusahaan asing besar ada di Jakarta. Sehingga penerimaan pajak nasional juga sebagian besar dari perusahaan yang berkantor di Jakarta, yang berarti bagi hasil pajak untuk Jakarta juga besar. Sehingga sangat wajar kalau pada APBD-P 2024 ini targetnya ditingkatkan sebesar 24,3% atau Rp. 4,69 Triliun. Mengapa baru sekarang target penerimaan dari transfer pemerintah pusat ini berani dinaikkan cukup besar. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedua, Fraksi PKS prihatin dengan diturunkannya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Rp. 1,9 Triliun atau 3,63% dari penetapan APBD 2024. Meskipun secara keseluruhan target pendapatan daerah meningkat 3,8%, namun itu disebabkan meningkatnya target penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Penurunan target PAD ini terutama berasal dari target pendapatan pajak daerah yang diturunkan sampai Rp. 1,26 Triliun dan lain-lain PAD yang sah yang turun sampai 635 Miliar. Penurunan target pajak daerah ini bahkan lebih dari 200% dibanding penurunan pada APBD-P 2023 yang hanya diturunkan Rp. 600 miliar. Penurunan target ini patut dipertanyakan mengingat situasi perekonomian Jakarta sudah relatif pulih pasca Pandemi Covid-19 dan aktivitas sosial, ekonomi dan bisnis juga sudah berangsur normal. Sehingga harusnya penerimaan dari PAD khususnya yang berasal dari pajak daerah serta lain-lain PAD yang sah bisa meningkat lagi dibanding pada masa pandemi. Bagaimana bisa target pendapatan daerah ini justru diturunkan pada saat perekonomian sudah kembali normal. Hunian kamar maupun venue di hotel-hotel besar sudah kembali normal bahkan harus antri. Demikian juga dengan rumah makan dan kegiatan hiburan yang sudah kembali normal dan selalu ramai.

Disamping itu dalam pandangan Fraksi PKS, masih banyak potensi penerimaan pajak daerah yang belum tergali maksimal akibat lemahnya pendataan dan *assessment* potensi pajak daerah terutama yang berasal dari aktivitas bisnis yang bergulir setiap hari seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan sebagainya serta tidak berjalannya Fiscal Cadaster untuk pajak yang terkait dengan properti. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar Pemprov DKI Jakarta melalui SKPD terkait benar-benar transparan berapa sebetulnya potensi pajak daerah dari berbagai aktivitas bisnis tersebut ? Berapa jumlah kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor ? Berapa jumlah hotel di Jakarta dan tingkat hunian hariannya ? Berapa jumlah rumah makan dengan berbagai jenis dan kelas serta transaksi hariannya? Mengapa semua jenis pajak dari kegiatan-kegiatan tersebut menurun target penerimaannya ? Tidak bosan Fraksi PKS selalu menekankan pentingnya menggunakan sistem *real time online* dalam penerapan pajak daerah untuk jenis-jenis pajak tertentu sehingga pajak daerah yang didapatkan bisa mendekati potensi yang sebenarnya. Sehingga harusnya target penerimaan pajak daerah ini masih tetap bisa ditingkatkan, bukan justru diturunkan. **MOHON TANGGAPAN !!**

Ketiga, Target retribusi memang dinaikkan sebesar 38% atau Rp. 183,7 Miliar. Namun Fraksi PKS menilai kenaikan target retribusi dalam APBD-P 2024 ini adalah hal yang wajar karena target awalnya yang rendah yaitu hanya Rp. 483,1 Miliar. Fraksi PKS berpandangan seharusnya target retribusi ini bisa dinaikkan lagi mengingat potensi retribusi ini masih sangat besar terutama dari retribusi parkir dan retribusi jasa umum maupun jasa usaha lainnya. Mengapa target

penerimaan dari retribusi ini masih belum maksimal kenaikannya dibandingkan dengan potensi yang ada ? Apakah tidak ada strategi untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah ini tanpa menghambat iklim usaha ? **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Keempat, dari sisi belanja daerah, belanja operasi maupun belanja modal menalami kenaikan cukup besar dalam APBD-P 2024 ini. Belanja operasi meningkat Rp. 1,7 Triliun terutama dari komponen belanja subsidi yang meningkat Rp. 717 Miliar dan belanja modal meningkat Rp. 1,68 Triliun atau sebesar 14,53%. Pada pelaksanaan APBD 2023, belanja operasi yang dialokasikan Rp. 60,38 Triliun ternyata penyerapannya hanya 95,32% dan masih ada Rp. 2,82 Triliun yang tidak terserap. Sementara untuk belanja modal yang dialokasikan Rp. 10,85 Triliun ternyata penyerapannya hanya 81,63% dan masih ada hampir Rp. 2 Triliun yang tidak terserap. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan APBD 2023, perlu dipersiapkan dengan sangat matang dan cermat termasuk memperhatikan aspek regulasi yang ada agar eksekusi belanja operasi maupun belanja modal ini bisa terealisasi dengan baik. Segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan khususnya belanja modal untuk komponen belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan harus dipersiapkan dengan cermat sehingga penyerapannya tinggi dengan tetap memperhatikan kualitas pengadaannya. Jangan sampai alokasi anggaran belanja yang sudah ditingkatkan ternyata tidak terserap dengan baik dan menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) menjadi tinggi. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kelima, Fraksi PKS melihat Belanja Hibah di Komisi A cukup besar mencapai total Rp. 953 miliar. Hibah yang besar khususnya belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp. 718,5 miliar dan hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 192,4 miliar. Tanpa mengurangi respek terhadap lembaga-lembaga penerima hibah tersebut dan pentingnya hibah ini, Fraksi PKS menilai perlu dilakukan evaluasi atas manfaat dari belanja hibah tersebut. Hal ini mengingat ada pos-pos yang lebih membutuhkan anggaran yang mencukupi khususnya yang terkait dengan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik kepada masyarakat seperti anggaran untuk layanan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyediaan air bersih dan layak, sanitasi, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Lebih baik sebagian belanja hibah dialokasikan untuk program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara langsung. **MOHON TANGGAPAN !!**

Catatan **Keenam**, Fraksi PKS prihatin dengan penurunan target penerimaan dari *deviden* BUMD dalam APBD Perubahan yang mencapai Rp. 195 Miliar atau sekitar 24,5%. BUMD memang tidak hanya berorientasi mendapatkan keuntungan namun juga menjalankan misi pelayanan publik serta penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD yang terus bertambah setiap tahunnya serta beberapa BUMD yang menjalankan bisnis

berorientasi keuntungan, sudah selayaknya BUMD memberikan kontribusi yang signifikan pada penerimaan daerah.

Demikian juga dengan penerimaan dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan yang mencapai Rp. 291,2 Miliar atau diturunkan sebesar 58,6%. Padahal banyak sekali aset pemerintah yang berada di lokasi-lokasi strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Pemprov DKI Jakarta harusnya sudah benar-benar melakukan inventarisasi, pemetaan dan pendalaman terkait aset-aset milik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan PAD. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Ketujuh, Fraksi PKS melihat bahwa dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran untuk APBD 2024, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan seperti anggaran untuk penebusan ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Selain itu juga penyelesaian isu utama pembangunan daerah diantaranya Manusia Sehat, Berdaya Saing, dan Setara, utamanya terkait pencegahan stunting, pemerataan pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Hal yang sama juga disebutkan dalam kriteria perubahan RKPD Tahun 2024.

Oleh karena itu Fraksi PKS meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pengurangan anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti alokasi anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta, subsidi pangan bagi keluarga tidak mampu dan

anggaran yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Carut marut data KJP Plus dengan cukup banyaknya warga masyarakat tidak mampu, terhapus dari data penerima KJP Plus maupun bantuan sosial lainnya menjadi sesuatu yang harusnya tidak boleh terjadi. Begitu juga dengan isu pengurangan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemda dikhawatirkan terjadi karena adanya pengurangan anggaran untuk dua kebutuhan dasar tersebut akibat menurunnya penerimaan daerah. Bahkan Fraksi PKS meminta agar alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar tersebut ditingkatkan mengingat masih banyak masyarakat Jakarta yang mengalami kesulitan ekonomi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan melemahnya daya beli masyarakat. Fraksi PKS juga meminta kepada Pemprov DKI agar memperhatikan kebutuhan masyarakat terkait sarana olah raga. Sebagai contoh adalah rencana pembangunan GOR di kecamatan Mampang Prapatan yang sampai saat ini belum dibangun. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Penjabat Gubernur dan jajarannya.

*Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriaq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 8 Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi DKI Jakarta**

Ketua,



H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd

Sekretaris,



Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, MM



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Disampaikan Oleh :

H. Ali Muhammad Johan,C,SE.,MH

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

**PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
8 AGUSTUS 2024**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024**

**Disampaikan oleh : H. Ali Muhammad Johan, C, SE., MH
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta**

*Bismillahi rahmannirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, syalom
Om Swastiastu, Namu Buddhaya
Salam Kebajikan*

- Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Bapak Heru Budi Hartono, Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah - Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi kami, sebagai umat yang beragama marilah kita memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita selaku pengemban amanah rakyat dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan untuk menyampaikan

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah lebih awal menyusun dan menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Fraksi Partai Demokrat berharap agar ke depan, *timeline* dari setiap siklus penyusunan APBD dapat lebih dipatuhi agar tersedia waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan, pencermatan dan pendalaman terhadap seluruh materi/muatan dokumen APBD sehingga APBD yang dihasilkan lebih berkualitas dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga Jakarta.

Selain itu, dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat menghimbau seluruh pimpinan Partai Politik di DKI Jakarta untuk senantiasa menjaga stabilitas politik jelang Pilkada Jakarta Tahun 2024 sehingga terbangun iklim politik yang kondusif yang merupakan prasyarat melaksanakan pembangunan.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan materi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan sebagai berikut:

Pertama, Terkait dengan Pajak Daerah, Fraksi Partai Demokrat menyadari bahwa perlambatan ekonomi global dan nasional yang

berdampak pada daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tentunya membawa pengaruh pada penerimaan Pajak Daerah.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, mohon dapat dijelaskan secara lebih rinci faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi Pajak Daerah pada semester I Tahun 2024, di mana baru dapat direalisasikan sebesar 35,93% dari target Rp46,24 triliun.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mohon dapat dijelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai target realisasi penerimaan untuk pajak daerah, khususnya untuk: **PKB, BBNKB, Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, PBB-P2, dan BPHBT. Mohon Penjelasan!**

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2024 dan Pemberian Insentif Pajak Daerah terhadap rencana penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024. **Mohon Penjelasan!**

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar:

- menyempurnakan efektivitas administrasi pajak daerah melalui penyempurnaan sistem informasi pajak dan modernisasi pelayanan pajak
- melakukan penguatan penegakan hukum melalui pengawasan secara intensif, pemberlakuan sanksi secara efektif atas pelanggaran peraturan perpajakan
- memformulasikan berbagai insentif pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- meningkatkan kualitas data wajib pajak melalui integrasi dan pemuktahiran data wajib pajak.

Mohon Tanggapan!

Kedua, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai peningkatan penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2024 direncanakan akan mengalami kenaikan sebesar 24,30 persen atau Rp4,69 triliun menjadi Rp24,02 triliun. **Mohon Tanggapan!**

Ketiga, mengenai Kebijakan Belanja Daerah, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai masih rendahnya realisasi Belanja Modal, di mana dari anggaran sebesar Rp11,55 triliun baru dapat direalisasikan sebesar Rp1,14 triliun atau sebesar 9,91%. Padahal pada APBD-P 2024 direncanakan penambahan belanja modal sebesar Rp1,68 triliun. **Mohon Penjelasan!**

Masih terkait dengan Belanja Daerah, Fraksi Partai Demokrat memberikan **pandangan dan catatan atas beberapa program Pembangunan** sebagai berikut:

- a) Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Kepgub Nomor 665 Tahun 2023.
- b) Terkait dengan penanganan *stunting*, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif bukan hanya melalui perbaikan asupan gizi melainkan juga melakukan program perbaikan lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, dan sanitasi yang baik.
- c) Fraksi Partai Demokrat meminta agar UMKM dapat diperhatikan secara khusus, dalam hal ini APBD Provinsi DKI Jakarta harus dapat memberikan alokasi anggaran yang lebih besar bagi UMKM untuk antisipasi dampak terjadinya resesi ekonomi.
- d) Terhadap keberadaan pasar tradisional yang mulai ditinggalkan masyarakat, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya segera merevitalisasi pasar tradisional, kami berharap agar revitalisasi yang dilakukan bukan hanya terbatas pada aspek perbaikan fisik melainkan juga

menciptakan lingkungan pasar yang menarik pengunjung. **Mohon tanggapan!**

- e) Dalam rangka mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan dukungan anggaran yang diperlukan oleh Dewan Kesenian Jakarta.

Selain itu, dalam pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) agar segera dilakukan pembenahan terhadap tata kelola kawasan yang baik, transparan dan memiliki keberpihakan kepada pemangku kepentingan PKJ TIM, terutama para pegiat seni budaya.

- f) **Penanganan Banjir**, Fraksi Partai Demokrat meminta agar program penanganan banjir dapat direalisasikan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026. Selain itu, perlu terus dibangun koordinasi dan kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyangga untuk mendukung berbagai program penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta.
- g) **Penanganan Kemacetan**, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan dan saran sebagai berikut:
- ✓ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat berbagai regulasi yang berorientasi pada kota layak huni dan Pengaturan Tata Ruang yang mengacu pada *compact city* (kota yang terintegrasi) di mana setiap sub daerah dikembangkan dengan basis meminimumkan kebutuhan transportasi.
 - ✓ Bersama dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan sinkronisasi Rencana Induk Transportasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah-daerah penyangga Jakarta.

- ✓ Meminta dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal di Provinsi DKI Jakarta.
 - ✓ Meminta dukungan Pemerintah Pusat untuk integrasi jaringan KRL Commuter dengan berbagai jaringan moda transportasi lainnya di wilayah Jakarta.
- h) **Penyediaan Air Bersih**, sampai dengan Maret 2023 menurut Indonesia Corruption Watch, cakupan layanan air di Jakarta stagnan di angka 65 persen.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merealisasikan target prioritas peningkatan akses air minum perpipaan melalui:

- 1) Pendampingan pembangunan SPAM Regional; 2) Pengembangan jaringan IPA; dan 3) Penyaluran subsidi layanan air bersih.
- i) **Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau**, Terbatasnya lahan di Jakarta menyebabkan tren pemenuhan kebutuhan akan hunian dalam beberapa dekade terakhir melebar ke kota-kota satelit di sekitar Jakarta yang menimbulkan berbagai eksek negatif seperti kemacetan dan polusi udara.

Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mencari berbagai solusi dan skema pembiayaan kreatif bagi penyediaan hunian di tengah kota, termasuk, misalnya melakukan konsolidasi lahan vertikal. **Mohon Tanggapan!**

- j) **Penanggulangan Sampah**. Tahun 2045 diperkirakan adanya kebutuhan 83 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Saat ini baru ada 1 TPST yaitu TPST Bantargebang. Artinya, setiap tahun harus ada progres dan alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan TPST tersebut. **Mohon Penjelasan!**

- k) Fraksi Demokrat meminta agar besaran honor Kader Dasawisma, Posyandu dan Jumantik dapat dikaji ulang dan ditingkatkan karena kinerja para kader Dasawisma dan Jumantik sangat penting sebagai garda terdepan membantu Kelurahan secara *door to door* baik untuk penyuluhan dan pencegahan penyakit endemic, stunting maupun mensosialisasikan berbagai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.
- l) Terkait dengan pelaksanaan pemadanan data penerima KJP/KJMU yang diseleksi berdasarkan DTKS dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang menyebabkan banyaknya keluhan oleh warga terdampak. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa penerima bansos harusnya warga yang sesuai kriteria, namun demikian proses verifikasi yang dilakukan harus dipastikan akurat sehingga tidak merugikan warga Jakarta yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Jangan sampai siswa dan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan harus putus sekolah akibat proses sinkronisasi data yang dilakukan.
Mohon Tanggapan!

Kelima, Kebijakan Pembiayaan Daerah, menyoroti Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) bagi BUMD dalam RAPBD Tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp7,90 triliun. Di mana PMD diberikan kepada:

- a) PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2,18 triliun.
- b) PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp4,7 Trilyun.
- c) PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200 Miliar.
- d) PT Jakarta Industrial Estate, Pulo Gadung sebesar Rp225 miliar.

Terhadap pemberian PMD kepada BUMD pada tahun ini maupun sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan dan catatan sebagai berikut:

- a) Untuk dana PMD yang peruntukannya belum terserap dan masih ditampung dalam rekening BUMD penerima agar dapat

dikembalikan ke Kas Daerah, dan jika ternyata masih dibutuhkan maka dapat diajukan kembali oleh BUMD terkait melalui permohonan realokasi PMD pada periode berikutnya. Hal ini **untuk mencegah penyalahgunaan dana PMD dipergunakan di luar peruntukannya dan untuk membiayai operasional BUMD** karena pada hakikatnya PMD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat.

- b) Dalam hal pengelolaan Aset BUMD, BP-BUMD agar lebih aktif melakukan pendataan aset-aset BUMD dalam rangka meningkatkan kontribusi PAD kepada Pemprov DKI Jakarta.
- c) BP-BUMD perlu memantau seluruh Rencana Bisnis Jangka Panjang, Menengah, dan termasuk RKA Tahunan BUMD agar seluruh aktivitas BUMD dapat terpantau dan dievaluasi secara terus menerus dalam rangka menjaga implementasi GCG dan Manajemen Risiko di seluruh BUMD.
- d) BP-BUMD agar segera melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh penugasan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui apakah bahwa penugasan tersebut telah sesuai dengan tujuan penugasan antara lain: Pengelolaan pulau-pulau reklamasi Teluk Jakarta yang sudah terbangun; penyediaan transportasi publik terintegrasi/Jaklingko, penyediaan hunian terjangkau/DP Nol Rupiah; SJUT, Pengolahan Sampah dan lain-lain.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Kami berharap pertanyaan, pandangan, saran, dan kritik yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pihak eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terima kasih.

Demokrat bersama rakyat! Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat!

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 08 Agustus 2024
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



Desie Christhyana Sari, SE., M.Kom

Sekretaris,



H. Ali Muhammad Johan, C, SE., MH



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Disampaikan oleh: Oman R Rakinda, S.IP, M.Si
Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 8 Agustus 2024

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Disampaikan oleh: Oman R. Rakinda, S.IP, M.Si

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat:

- Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya;
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta **(Forkopimda)**;
- Rekan-rekan Anggota Dewan, serta Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang kami hormati,

Pada perayaan hari Ulang Tahun Kemerdekaan atau HUT RI Ke-79 yang akan dilaksanakan secara hybrid di IKN dan DKI Jakarta agar dapat dimatangkan dengan baik, mengingat perhelatan ini bukan sebuah perayaan saja tapi juga ada makna penghormatan dan rasa syukur terhadap kemerdekaan yang sudah kita dapatkan. Selain itu ada juga perhelatan Pilkada yang akan menjadi magnet besar dalam perhelatannya. Kami meminta agar persiapan pelaksanaan dari pilkada dapat dimaksimalkan tanpa adanya celah permasalahan baik pada proses awal sampai dengan terlaksananya perhelatan tersebut. Keamanan, ketertiban dan terlaksananya pemilu yang jujur.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat;

Fraksi PAN melihat bahwa perubahan APBD harus dilakukan dengan memperhatikan mekanisme atau proses yang sesuai dengan kebutuhan, agar perubahan APBD dapat berjalan dengan baik. Selain itu, harus adanya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta meneliti sejauh mana APBD tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kami Fraksi PAN memberikan beberapa catatan yang telah kami telaah pada dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara :

1. Kami Fraksi PAN menanyakan adanya penurunan PAD dari 46.240.000.000.000 (empat puluh enam triliun dua ratus empat puluh miliar) menjadi 44.980.000.000.000 (empat puluh empat triliun Sembilan ratus delapan puluh miliar) atau -2,72% (minus dua koma tujuh puluh dua persen). Padahal kami sangat optimis dengan kenaikan PAD pada anggaran Tahun 2023 yang dapat menaikkan PAD hingga 100,57% (seratus koma lima puluh tujuh persen). Sementara kami juga melihat adanya beberapa penambahan di pos-pos anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik yang berdampak langsung ke masyarakat. **Mohon Tanggapannya...**

2. Dalam PMD kami melihat ada kenaikan sebesar 7.253.905.829.467 (tujuh triliun dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh) menjadi 7.317.545.546.679 (tujuh triliun tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan). Kami mempertanyakan urgensi dari penambahan modal tersebut khususnya pada PT Jakarta Propertindo..? sementara dalam catatan BPK, PT Jakarta propertindo harus memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp. 65,63 M (enam puluh lima koma enam puluh tiga miliar rupiah) kepada rekanan dan menyetorkannya ke rekening proyek JIS dan merekomendasikan kepada Jakpro mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 7, 26 M (tujuh koma dua puluh enam miliar rupiah) kepada rekanan. Pertanyaan kami, PMD untuk Jakpro diperuntukkan untuk apa..? karena selama ini Jakpro menggunakan PMD yg tidak sesuai peruntukannya..**Mohon Penjelasannya..**
3. Pengelolaan pajak daerah merupakan hal penting karena merupakan sumber pemasukan keuangan pokok dari daerah. Dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan penompang terbesar dalam penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan fasilitas publik lainnya. Kami melihat pada beberapa pajak daerah yang merupakan penompang pendapatan DKI Jakarta mengalami penurunan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada angka 9.690.000.000.000 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh miliar) turun menjadi 9.400.000.000.000 (sembilan triliun empat ratus miliar) atau -3,09% (minus tiga koma sembilan persen), bahkan turun dari Tahun Anggaran 2023 yang mengantongi pajak 9,41 T (sembilan, empat puluh satu triliun). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di angka 10.500.000.000.000 (sepuluh triliun lima ratus miliar) menjadi 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun) atau -4,67% (minus empat koma enam puluh tujuh persen). Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) di angka 6.450.000.000.000 (enam triliun empat ratus lima puluh miliar) menjadi 6.250.000.000.000 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar) atau -3,10% (minus tiga koma sepuluh persen). Adanya penurunan perolehan dari Pajak Daerah menjadi sebuah kelemahan dalam pendapatan PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami juga menyoroti masalah kurang maksimalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perolehan Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sulit diproyeksikan perolehannya, padahal banyaknya aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaan kami, apa yang menjadi faktor pengaruh penurunan pajak daerah tersebut. Karena pada Tahun Anggaran 2023, ketiga pajak yang saat ini minus pendapatan merupakan penyumbang PAD terbesar. **Mohon Penjelasannya..**

4. Kami Fraksi PAN menyoroti pada program pelayanan kesehatan gizi masyarakat dengan anggaran yang dianggarkan diperubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dimaksimalkan untuk mengatasi masalah Stunting DKI Jakarta. Pengawasan anggaran dan pelaksanaan yang tepat dalam pemenuhan gizi di setiap Wilayah Jakarta.
5. Retribusi Daerah merupakan faktor yang dominan peran dan kontribusinya untuk menunjang Pemerintah daerah, kami melihat dalam postur APBD bahwa pendapatan Retribusi yang terbesar hanya ada di Retribusi Jasa Umum sementara di Retribusi Jasa Usaha -0,35% (minus nol koma tiga puluh lima persen) dan Retribusi Perizinan Tertentu di angka 0,01% (nol koma nol satu persen). Ini menjadi catatan bahwa kerja yang kurang maksimal dari SKPD, diantaranya Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengevaluasi kinerja serta regulasi dalam pencapaian Retribusi Daerah. **Mohon Tanggapannya...**

Saudara Pimpinan Rapat, Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat

Demikian pandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Pada akhirnya, kepada saudara Pimpinan Rapat, saudara Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan rekan-rekan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Aamiin.

Wabillahittaufig wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 8 Agustus 2024

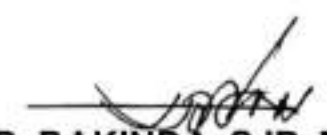
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

K e t u a,



DR. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc

Sekretaris,



OMAN R. RAKINDA, S.IP, M.Si



Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Terhadap

**Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2024**

dibacakan oleh:

Simon Lamakadu

**Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Kamis, 8 Agustus 2024**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Yang terhormat,
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta,
PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Beserta Jajarannya,
Para Anggota DPRD Provinsi Jakarta Yang Kami Banggakan,
Serta Warga Masyarakat DKI Jakarta yang Kami Cintai.

Salam Solidaritas!

Sebelum saya membacakan pandangan umum ini, izinkan kami untuk mengucapkan lebih dulu selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 pada pekan depan dengan tema "**Nusantara Baru Indonesia Maju**" semoga tema tersebut dapat membawa semangat pembaharuan pada DKI Jakarta yang sebentar lagi tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kami harap semangat ini menggerakkan Jakarta untuk terus berinovasi sehingga mencapai visi sebagai Kota Global.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Izinkan saya, mewakili *bro-sis* anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI), untuk menyampaikan pandangan umum kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk mengawali pandangan umum ini, kami menyayangkan bahwa penjadwalan pembahasan Perubahan APBD 2024 sangat berdekatan dengan jadwal pembahasan P2APBD 2023, Pembahasan Rancangan Perda RTRW 2024-2044 dan RPJPD 2025-2045. Hal ini menyebabkan pembahasan menjadi tergesa-gesa dengan proses diskusi dalam pembahasan menjadi tidak tuntas dan tidak maksimal. Apalagi pada rapat Badan Anggaran kemarin kami menilai pihak eksekutif seperti tidak siap dalam pemaparan Perubahan KUA-PPAS 2024.

Dalam Rapat Banggar, Fraksi PSI sempat menanyakan lampiran dokumen PPAS yang menyajikan detail perubahan anggaran program di masing-masing dinas, Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta menyatakan dokumen detail perubahan anggaran belum tersedia karena jadwal yang mepet.

Hal tersebut bertentangan dengan Permendagri nomor 15 tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024, yang menyebutkan bahwa *penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD* paling lambat minggu 1 Bulan Agustus. Sehingga, kata "mepet" seharusnya tidak dijadikan alasan.

Mohon Tanggapan.

Saya ingin memulai penyampaian pandangan umum ini dengan mengkritisi sulitnya akses kami terhadap SMART APBD, saya dewan P.A.W. namun dari semenjak saya dilantik hingga saat ini saya tidak mendapat akses sama sekali terhadap SMART APBD dan demi menjalankan fungsi pengawasan yang diamanahkan kepada saya akhirnya saya mengakses SMART APBD melalui akun rekan sesama fraksi saya yang lain. Menurut kami, hal semacam ini tidak selayaknya terjadi, terlebih hal ini berkaitan dengan fungsi kepengawasan dewan terhadap eksekutif. Dengan APBD yang mencapai Rp 85 Triliun yang dimiliki oleh pemprov DKI Jakarta seharusnya dapat meningkatkan kualitas transparansi dan akses publik terhadap anggaran kita.

Mohon Tanggapan

Terkait Rancangan APBD 2024, secara garis besar, Fraksi PSI memberikan kritik dan apresiasi sebagai berikut.

1. Penurunan Target Pendapatan Asli Daerah

Kami mempertanyakan turunya target Pendapatan Asli Daerah hampir Rp 2 Triliun, dari Rp 52,4 Triliun menjadi Rp 50,5 Triliun. Kami memahami adanya perubahan kebijakan terkait pajak daerah yang mungkin mempengaruhi penerimaan pajak Jakarta. Namun kami tetap mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk dapat terus mempertahankan kinerja sebagaimana pada TA 2023 yang berhasil merealisasikan penerimaan pajak daerah yang lebih tinggi dari target.

Namun, kami tetap menyoroti penurunan target penerimaan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang diturunkan hingga lebih dari setengah targetnya, yang hanya menjadi Rp 205 Miliar, dari sebelumnya Rp 496 miliar. Selain itu juga penurunan pada target dividen dari BUMD hingga 25% atau turun Rp 195 miliar. Kami menyayangkan target pesimis pada dua sektor penerimaan ini karena kami melihat potensi besar dari dua sektor ini jika dilakukan pengelolaan aset daerah dan tata kelola BUMD yang baik.

Mohon Tanggapan

2. Fraksi PSI Mendukung Inisiasi Positif Terkait Kenaikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang Dialokasikan pada P4OP.

Namun, kami tetap mengapresiasi langkah positif yang diambil oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono terhadap keluhan-keluhan masyarakat DKI Jakarta terhadap isu bantuan sosial pendidikan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Kami melihat terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp 493 Miliar menjadi Rp 2,7 Triliun. Fraksi PSI menilai keterbukaan PJ Gubernur DKI Jakarta menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada di masyarakat semestinya diteladani oleh para pemimpin daerah di Indonesia.

Mohon Tanggapan

3. Solusi Tingginya PHK di Jakarta

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, dalam rentang Bulan Januari hingga Juni 2024, Jakarta memiliki tingkat pemutusan hubungan kerja yang tinggi sebanyak 7.649 pekerja, dan disebut sebagai angka PHK tertinggi di Indonesia. Adapun jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 6.786 pekerja. Di sisi lain, Pemprov Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) mencatat adanya pemutusan hubungan kerja sebesar 847 pekerja dengan pemutusan tertinggi terjadi di Jakarta Utara sebesar 249 pekerja.

Meski terdapat perbedaan angka PHK dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Disnakertrans, kami menilai tingginya pemutusan hubungan kerja di Jakarta ini perlu menjadi sebuah catatan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran yang dapat mendorong program-program yang dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Mohon tanggapan.

4. Subsidi Bagi Transportasi Publik

Kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar 65 triliun rupiah per tahun, setara dengan 178 miliar rupiah per hari, dan juga menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 2,2 juta liter per hari. Sementara saat ini *mode share* transportasi publik Jakarta hanya 18an%. Tingginya penggunaan transportasi pribadi ini selain berkontribusi pada kemacetan juga berdampak pada pencemaran polusi udara yang merugikan masyarakat. Untuk itu kami mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan anggaran subsidi transportasi publik, yang dinaikkan menjadi Rp 5,5 triliun dari sebelumnya Rp 4,8 triliun.

Atas kenaikan anggaran ini kami meminta penyelenggara transportasi publik antara lain Transjakarta, LRT, dan MRT dapat mengemban amanah ini untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan transportasi publik, termasuk peningkatan layanan di jam-jam sibuk yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat antara lain

headway menjadi semakin lama. Dengan peningkatan layanan transportasi publik kami yakin masyarakat akan mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik.

Mohon Tanggapan.

5. Penurunan Biaya Belanja Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan.

Penurunan anggaran sebesar Rp 13 miliar di tengah kurangnya personil pemadam kebakaran, adalah keputusan yang sangat memprihatinkan dan tidak bertanggung jawab. Saat ini Kebutuhan petugas Gulkarmat di DKI Jakarta yang diperkirakan sebanyak 10.000 personel namun di DKI Jakarta saat ini hanya ada 4.000 petugas sehingga masih ada gap sebesar 6.000 personil. Dalam kondisi di mana kebutuhan akan tenaga pemadam kebakaran semakin mendesak, terutama dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana kebakaran, langkah ini seolah-olah mengabaikan keselamatan publik dan kesejahteraan para petugas yang berada di garis depan. Kebijakan pengurangan anggaran ini tidak hanya menghambat upaya penanggulangan kebakaran yang lebih efektif tetapi juga memperburuk kekurangan sumber daya manusia yang sudah kritis. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman kebakaran yang bisa berakibat fatal. Keputusan ini perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan urgensi dan risiko yang ada, serta menemukan solusi yang tidak mengorbankan keselamatan publik dan profesionalisme para pemadam kebakaran.

Mohon Tanggapan

6. Penghapusan Anggaran Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fraksi PSI sangat menyayangkan terkait adanya penghapusan anggaran mengenai Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan di DKI Jakarta mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas dengan total penghapusan anggaran sebesar Rp 7,5 Miliar.

Kami prihatin dengan nasib para Pendidik dan Tenaga Kependidikan di DKI Jakarta yang tidak mendapat dukungan berupa pembiayaan untuk mengembangkan kompetensi yang dapat bermanfaat untuk proses belajar mengajar. Kami menilai penghapusan anggaran pengembangan ini mendegradasi kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Apakah Bapak-Ibu sekalian, Ingin Putra-Putri Bapak/Ibu dididik oleh Para Pengajar yang tidak kompeten di bidangnya? Maka dari itu, Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk terus memotivasi dan mengupayakan dengan maksimal terhadap peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik yang ada.

Mohon Tanggapan.

7. Pengikisan Anggaran Pembangunan Puskesmas

Tidak hanya pengurangan anggaran mengenai Pendidikan namun, juga terdapat pengikisan anggaran mengenai Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada anggaran Pembangunan Puskesmas di setiap Suku Dinas Wilayah DKI Jakarta. Kami beranggapan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menganggap remeh PR-PR yang ada pada tahun sebelumnya mengenai sulitnya aksesibilitas pelayanan kesehatan karena tidak adanya Puskesmas Pembantu di beberapa Kelurahan di DKI Jakarta.

Kami sangat ingat betul mengenai pemberitaan media terkait keluhan masyarakat DKI Jakarta atas tidak adanya kehadiran puskesmas pembantu di beberapa kelurahan. Padahal, di setiap Suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada APBD 2024 setidaknya mengalokasikan Rp 30 Miliar untuk Pembangunan Puskesmas. Namun, mengapa pada Perubahan APBD 2024 para Suku Dinas Kesehatan tersebut mengikis anggaran untuk Pembangunan Puskesmas?

Mohon Tanggapan.

8. Keseriusan Penyediaan Air Bersih

Kami sangat menyayangkan alokasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk PAM Jaya yang ditetapkan sebesar Rp 0 pada APBD 2024 dan juga pada Perubahan APBD 2024. Kami mendesak PAM Jaya untuk lebih serius dalam mencapai target 100% pipanisasi di Jakarta pada tahun 2030. Fraksi PSI mengalami kesulitan memperjuangkan PMD yang besar bagi PAM Jaya setiap tahunnya apabila PMD yang diberikan tidak terserap dengan baik. Perlu diingat bahwa tahun 2030 tinggal 6 tahun lagi, sehingga strategi yang jelas sangat diperlukan untuk mencapai target pipanisasi 100%. Saat ini, cakupan pipanisasi di DKI Jakarta baru mencapai 65,35%. Selain itu, PAM Jaya juga memiliki tugas besar untuk menurunkan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW) menjadi 20%, sementara saat ini tingkat NRW masih di angka 46,6%.

Fraksi PSI selalu mendukung agar PAM Jaya dapat menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Kami akan selalu mengupayakan alokasi anggaran PMD yang memadai melalui demi terpenuhinya kebutuhan air bersih yang sangat vital bagi masyarakat DKI Jakarta, untuk itu kami meminta komitmen PAM Jaya untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menyelesaikan PR-PR penyediaan air bersih.

Mohon Tanggapan.

9. Jakarta Butuh Langit Cerah

Pencemaran Udara menjadi salah satu isu yang sampai hari ini menjadi perhatian banyak pihak. Pada bulan Mei 2024 kemarin, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan udara terburuk di Dunia menurut IQAir. Fraksi PSI turut

memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan serta Lansia dan Balita untuk keberlangsungan masa depan kehidupan mereka.

Fraksi PSI tentu saja mendukung terhadap penambahan anggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari total anggaran Rp 48,84 Miliar, yang dilakukan penambahan 2 kali lipat menjadi Rp 88,02 Miliar pada Perubahan APBD 2024. Namun, apakah DLH bisa amanah pada penambahan anggaran sebesar itu? Pemprov DKI Jakarta harus mengoptimalkan semua program terkait pengendalian pencemaran udara agar Jakarta dapat optimis langit kembali cerah.

Kami meminta DLH agar tidak hanya berfokus pada pemasangan Alat Deteksi Polusi dan Uji Emisi, karena Fungsi alat deteksi hanyalah bersifat "early warning", sehingga harus diikuti dengan tindak lanjut pengendalian polusinya. Tidak hanya terhadap polusi oleh densitas kendaraan bermotor di DKI, akan tetapi juga oleh beragam industri dan Pabrik yang ada di DKI Jakarta.

Yang kedua, uji emisi harus dijalankan sebagai salah satu syarat kelayakan setiap kendaraan bermotor untuk dapat beroperasi di Jakarta. Sepanjang 2023, polusi udara di DKI Jakarta telah menjadi isu nasional, juara dunia, dan penyumbang nyata atas penyakit serta kematian akibat gangguan pernafasan di DKI Jakarta.

Kami juga meminta Pemprov DKI dengan seluruh dinas terkait, untuk bersinergi untuk menindaklanjuti segala program yang dimungkinkan untuk melawan polusi udara di Jakarta, termasuk menaikkan pajak dan tarif parkir bagi kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi, pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor, rekayasa jam kerja dan sekolah, dan lain sebagainya.

Fraksi PSI meminta DLH yang memiliki anggaran triliunan rupiah serta ribuan SDM, untuk tidak hanya mengandalkan pendeteksi polusi dan uji emisi sebagai program terbaik DLH dalam rangka penanggulangan polusi. DLH perlu mencari gebrakan baru yang lebih efektif dan progresif dalam menanggulangi kenaikan kualitas buruk udara di DKI Jakarta.

Mohon Tanggapan

10. Banjir Rob Mengancam Warga Pesisir Jakarta

Ancaman Bencana banjir rob selalu mengintai warga pesisir Jakarta. Banjir Rob kerap kali datang setiap bulannya sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat di pesisir, aktivitas bongkar muat di pelabuhan, serta tambak garam dan perikanan darat. Kami menaruh perhatian khusus terhadap ancaman banjir rob yang mengancam keselamatan warga pesisir Jakarta, Khususnya bagi masyarakat Kamal Muara, Kapuk

Muara, Penjaringan, Pluit Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru yang selalu was-was ketika potensi banjir rob itu mengancam rumah mereka.

Mengingat DKI Jakarta juga akan masuk dalam musim penghujan, kami meminta Pemprov juga untuk siap siaga menyiapkan seluruh sarana prasarana pendukung dalam mengantisipasi bencana banjir. Fraksi PSI mendukung penuh penambahan anggaran terhadap Normalisasi/Restorasi Sungai dari Rp 277,84 Miliar menjadi Rp 519,38 Miliar, pembangunan Embung dan penampung air dari Rp 136,99 Miliar menjadi Rp 250 Miliar. Tetapi, kami ingatkan dengan anggaran sebesar ini, sudah sepatutnya penanganan banjir dapat lebih maksimal dan berjalan dengan baik.

Fraksi PSI juga menaruh perhatian khusus pada pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) atau *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)*. Hal ini menjadi penting untuk Jakarta, kami mendukung anggaran Rp 284 Miliar untuk proyek tersebut. Pembangunan tanggul raksasa di bagian utara teluk Jakarta bertujuan melindungi Jakarta dari bencana akibat perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut. Kami menyadari pembangunan proyek ini tidak dikerjakan sendiri oleh Pemprov, tetapi ikut melibatkan Pemerintah Pusat, karenanya Fraksi PSI mendorong Pemprov untuk turut serta bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk segera mewujudkan Giant Sea Wall agar dapat mewujudkan Jakarta Bebas Bencana Banjir.

Mohon Tanggapan

11. Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Fraksi PSI tidak bosan-bosan akan selalu mendorong isu penambahan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% yang mana sesuai dengan aturan perundangan. Padahal anggaran pembangunan RTH sampai 800an Miliar, tetapi sampai hari ini indeks ketersediaan Ruang Terbuka Hijau masih cukup jauh dari kondisi ideal, hanya sekitar 5%. Kami mendorong Dinas Pertamanan & Hutan Kota untuk berkomitmen serius dalam proses penganggaran pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kami meyakini kehadiran Ruang Terbuka Hijau sebagai paru-paru kota Jakarta dapat membantu memfiltrasi pencemaran udara di DKI serta menghadirkan kota yang layak anak serta kota hijau bagi masa depan warga Jakarta.

Mohon Tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sebagai kesimpulannya, kami ingin Pemprov DKI menjadikan APBD sebagai alat untuk pemerataan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pemerataan tingkat kesejahteraan serta taraf hidup bagi semua elemen masyarakat. Fraksi PSI juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk terus memaksimalkan penyerapan anggaran terutama anggaran yang menysasar pada program-program menyangkut kesejahteraan masyarakat luas, **terlebih penambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun ini seharusnya dapat diselaraskan dengan program presiden terpilih Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang berbentuk program makan siang gratis** sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menyelaraskan program dan memberi pelayanan dasar kepada masyarakat kota Jakarta.

Ke Istana Ketemu Prabowo-Gibran
Ke Balai Kota ketemu Mas Kaesang
Program Makan Siang Untuk Masa Depan
Bersama kita wujudkan Jakarta gemilang

Akhir kata, kami harap catatan yang kami sampaikan di pandangan umum Fraksi PSI ini dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari PJ Gubernur dan jajarannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Jakarta, 8 Agustus 2024
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
DPRD DKI Jakarta

Ketua



William Aditya Sarana, S.H.

Sekretaris



Justin Adrian, S.H., M.H.



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(APBD) TAHUN ANGGARAN 2024



Oleh :

JUPITER, SE.,MM

(BENDAHARA FRAKSI NASDEM DPRD DKI JAKARTA)

KAMIS, 8 AGUSTUS 2024



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2024

Di Bacakan Oleh:

JUPITER, SE.,MM

(Bendahara Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Salam Restorasi !

Kepada yang terhormat,

- Pimpinan Sidang Paripurna;
- Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin sekalian yang saya hormati;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Shallom, Salam Sejahtera untuk kita semua
Om Swasti asthu Namu budaya.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Pidato Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Dengan perkembangan kondisi tahun berjalan serta hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, Pemprov DKI perlu melakukan upaya akselerasi pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 – 2026. Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta setelah menelaah dan menghimpun masukan dari aspirasi masyarakat serta mempelajari keseluruhan dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, memandang perlu adanya beberapa evaluasi yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan program sebagai berikut ;

Pertama, terkait postur pendapatan daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengalami penurunan nilai dalam hal pendapatan hasil daerah sebesar Rp 2 Triliun lebih, akan tetapi dalam hal Pendapatan Transfer Pemprov DKI Jakarta mematok pada angka Rp 24 Triliun Lebih pada Raperda APBD-P 2024, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 4,6 Triliun lebih. Oleh karena itu Fraksi NasDem memandang perlunya kerja lebih dari Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan optimalisasi dari kebijakan Pajak Daerah dan retribusi daerah, dan juga Pemprov DKI Jakarta juga harus dapat lebih mengoptimalkan kembali Pendapatan Transfer dalam hal dana bagi hasil yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh dana bagi hasil yang berasal dari pajak penghasilan, dimana ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah daerah dari hasil pemungutan pajak Penghasilan PPh 21, PPh 25, dan PPh 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang di pungut oleh pemerintah pusat. Fraksi NasDem meminta agar fungsi koordinasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terjalin, dan transparansi dana bagi hasil antara pemerintah daerah dan pusat yang lebih dioptimalkan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah. **Mohon Tanggapan**

Kedua, Dalam hal belanja modal peralatan mesin pada dinas perhubungan sebesar Rp 72,5 Miliar lebih dalam rangka pengembangan *Intermediate Traffic System* (ITS). Fraksi NasDem mempertanyakan urgensi pengadaan alat sebesar Rp 72 Miliar

tersebut, Fraksi nasDem memandang dalam pengendalian kemacetan tidak fokus pada pengembangan dengan membeli peralatan dan mesin. Fraksi NasDem mendorong agar anggaran Rp72 miliar dapat digunakan pengembangan transportasi umum yang efisien, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat DKI Jakarta untuk meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi. Berdasarkan data yang Fraksi NasDem dapatkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat 21,1 juta lebih kepemilikan kendaraan pribadi yang terdiri dari kepemilikan kendaraan pribadi mobil sebesar 3,7 juta lebih, dan kepemilikan kendaraan sepeda motor sebesar 17,3 juta lebih. Data ini dapat diasumsikan jika 17,3 juta kendaraan tersebut beraktifitas di wilayah DKI Jakarta, terlebih lagi adanya kendaraan pribadi yang berasal dari luar Jakarta beraktifitas di wilayah DKI Jakarta yang akan menimbulkan permasalahan kemacetan yang tidak akan pernah terselesaikan. Untuk itu Fraksi NasDem meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar lebih fokus kepada pengembangan potensi transportasi umum yang efisien dan manfaatnya dapat di rasakan langsung oleh masyarakat DKI Jakarta.

Mohon Penjelasan

Ketiga, terkait dengan kebijakan belanja daerah dalam rangka belanja modal tanah dan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Fraksi NasDem mendapatkan data bahwa ada kenaikan nilai terhadap kedua kegiatan tersebut, diantaranya adalah penambahan sebesar Rp 281 Miliar untuk Belanja modal tanah, dan penambahan Rp 446 Miliar lebih untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Adanya penambahan di dua kegiatan tersebut bertolak belakang

dengan penyerapan anggaran Per Semester I Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang hanya mencapai 5,17% untuk belanja modal tanah, dan 11,81% untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dalam hal penyerapan ini, Fraksi NasDem menyoroti penyerapan anggaran pada Dinas Bina Marga yang hanya mencapai 0,03% pada belanja modal dalam hal pengadaan tanah Per 19 Juli 2024. Fraksi NasDem mempertanyakan perencanaan anggaran yang dilakukan dinas bina marga, dimana hal ini berpengaruh pada kegiatan pelayanan masyarakat yang sudah di rencanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Fraksi NasDem berpandangan bahwa dalam hal infrastruktur pembangunan agar Pemprov DKI Jakarta melalui SKPD terkait, jangan hanya fokus pada pembangunan besar yang bersifat makro saja, tetapi juga harus fokus pada pembangunan yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pembuatan saluran air bagi lingkungan RT yang belum memiliki saluran air, revitalisasi saluran yang sudah tidak layak khususnya bagi wilayah yang sering terjadi banjir, penerangan jalan, dan perbaikan jalan lingkungan. Hal – hal yang terkait pembangunan tersebut merupakan permasalahan warga yang sering kami dapatkan dari hasil Reses yang kami dapatkan. **Mohon Penjelasan**

Masih dalam masalah pembangunan, terkait pelayanan di bidang pemakaman, Fraksi NasDem mendorong agar Dinas Pertamanan juga dapat memperbaharui peralatan sarana prasarana bagi masyarakat DKI Jakarta yang mengalami keduakaan, seperti tenda yang layak pada saat penguburan dan kursi yang baik untuk digunakan, serta sarana dan prasarana lainnya yang diberikan

kepada masyarakat DKI Jakarta secara Gratis pada saat dilakukannya pemakaman di TPU. Hal ini dikarenakan Fraksi NasDem masih banyak menemukan sarana prasarana yang tidak layak yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga DKI Jakarta dalam melakukan prosesi penguburan kepada keluarga yang sedang berduka. **Mohon Tangapan.**

Keempat, dalam hal Pemberian bantuan sosial pada Kartu Jakarta Pintar. Fraksi NasDem masih menemukan adanya penyalahgunaan dana bantuan KJP yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti penggunaan dana KJP untuk kredit kendaraan atau juga digunakan untuk membeli peralatan elektronik, atau membeli kebutuhan tingkat tersier lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan awal bantuan sosial pada Kartu Jakarta Pintar itu diberikan bagi penerima KJP. Oleh sebab itu Fraksi NasDem mendorong agar Pemprov DKI Jakarta tidak memperbolehkan penerima bantuan sosial dalam bentuk KJP mengambil dana bantuan tersebut secara *cash*, dan mengatur sistem yang baik sehingga penggunaan KJP bisa digunakan pada tempat – tempat untuk mendukung kegiatan belajar siswa sekolah dan juga dapat menunjang tumbuh kembang anak seperti mendapatkan pangan sehat dan bergizi yang menjadi program yang sudah berjalan saat ini. **Mohon Tanggapan.**

Kelima, dalam hal program prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Percepatan penurunan prevelensi stunting, berdasarkan data yang di dapat oleh Fraksi NasDem DKI Jakarta yang berasal dari *dashboard* status Gizi pada Pusat data dan Teknologi Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dari bulan Januari

sampai dengan Agustus ditemukan jumlah kasus stunting sebanyak 10.340 kasus dan sebanyak 5.880 kasus yang sudah di selesaikan, sehingga meninggalkan 4.460 kasus balita stunting. Kemudian kasus balita Gizi Kurang sebanyak 10.178 kasus dan sebanyak 5.444 kasus sudah di selesaikan, sehingga meninggalkan 4.657 kasus balita dengan Gizi kurang. Dan juga ditemukan kasus balita underweight sebanyak 16.508 kasus dan sebanyak 8.480 kasus sudah di selesaikan, sehingga meninggalkan 8.028 kasus balita underweight. Kemudian ditemukan 1.638 kasus balita dengan Gizi kurang, dan telah ditangani sebesar 1.002 kasus, sehingga meninggalkan 636 kasus balita dengan Gizi buruk. Berdasarkan data tersebut fraksi nasdem menjumlahkan sebanyak 17.781 kasus balita yang bermasalah gizi dan juga stunting. Oleh karena itu, Fraksi NasDem mendorong agar Pemprov DKI Jakarta di dalam hal ini Dinas Kesehatan agar lebih serius lagi dalam menangani permasalahan stunting dengan kasus Gizi buruk yang ditemukan pada balita yang juga merupakan warga di wilayah Pemprov DKI Jakarta. Selain itu meminta Pemprov DKI Jakarta agar juga memberikan beban lebih bagi SKPD terkait dengan pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alat ukur kinerja yang jelas dalam upaya pencapaian target pelayanan masyarakat dibidang kesehatan. **Mohon Penjelasan**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, Fraksi NasDem mengingatkan kembali agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus kepada program yang bersifat makro, akan tetapi lebih

mengedepankan program yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta.

Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-NYA kepada kita dalam melaksanakan pembangunan Kota Jakarta,

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. **Salam Restorasi!**

Jakarta, 8 Agustus 2024

Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta

Ketua,



WIBI ANDRINO, SH.,MH

Sekretaris,



ABDUL AZIS MUSLIM, SH.



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



DISAMPAIKAN OLEH : BASRI BACO, SE., MM
Jakarta, 8 Agustus 2024

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Disampaikan oleh : Basri Baco, SE., MM.

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua/Pimpinan Rapat Paripurna Dewan;
Sdr. Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;
Sdr. Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum FRAKSI PARTAI GOLKAR, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap **Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.**

Pada kesempatan ini, saya mewakili FRAKSI PARTAI GOLKAR ingin menyampaikan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yang diperingati pada tanggal 17 Agustus mendatang. Merdeka bukan hanya sekedar kata, melainkan tekad untuk terus berkarya. Mari kita semua bersatu untuk membangun bangsa menuju bangsa yang bermartabat, maju dan berdaulat demi masa depan bangsa yang lebih baik. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka!!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum FRAKSI PARTAI GOLKAR terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.**

Dalam Pidato saudara Pj. Gubernur tentang Perubahan APBD TA 2024 disampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,60 persen dari penetapan sebesar Rp. 81,7 triliun menjadi Rp.85,4 triliun. Pendapatan Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp. 72,44 triliun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp. 75,22 triliun atau meningkat sebesar Rp.2,7 triliun atau sekitar 3,83 persen. Sedangkan Belanja Daerah yang semula dialokasikan sebesar Rp.72,60 triliun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp.3,69 triliun atau sekitar 5,09 persen sehingga menjadi Rp.76,29 triliun.

FRAKSI PARTAI GOLKAR meminta TAPD agar realistis dalam menargetkan pendapatan daerah sehingga bisa dicapai di akhir tahun. Jangan sampai menganggarkan terlalu tinggi, sehingga nanti dengan tidak tercapainya pendapatan akan menjadi utang di tahun depan.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024, FRAKSI PARTAI GOLKAR memberikan beberapa catatan penting :

1. Menjaga Program-Program Kebutuhan Dasar Masyarakat

FRAKSI PARTAI GOLKAR menekankan pentingnya mempertahankan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam Perubahan APBD Tahun 2024, dengan catatan agar program tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Kami berharap semangat dalam perubahan anggaran ini tidak mengganggu program-program prioritas yang telah disepakati bersama. Fokus anggaran harus diarahkan pada pelayanan publik, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, kemacetan, sampah, upaya penanggulangan bencana, jaminan perlindungan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana yang tercantum dalam Buku Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, postur anggaran pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,7 triliun atau 3,83%. Namun jika diuraikan secara

rinci, FRAKSI PARTAI GOLKAR melihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah khususnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak parkir justru malah mengalami pengurangan hingga 98% dari target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2024. FRAKSI PARTAI GOLKAR mempertanyakan alasan Pemprov DKI Jakarta melakukan pengurangan tersebut. **Mohon penjelasan!**

3. Program Sekolah Gratis

Sesuai dengan Amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1, yaitu memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD, maka pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi Amanat UUD 1945 dan UU No.20 Tahun 2003 dengan menganggarkan sebesar 19,7 triliun atau 25,94 persen dari total Belanja Daerah.

Fakta yang terjadi hari ini bantuan sosial terhadap pendidikan di Jakarta sangat tidak adil, tidak merata dan tidak tepat sasaran dikarenakan data kesejahteraan sosial yang kita miliki juga tidak akurat sehingga program KJP dan KJMU yang selama ini dijalankan oleh Pemda DKI Jakarta banyak mendapat aduan dan laporan terkait ketidakadilan dan ketidakmerataan pelaksanaan KJP dan KJMU dan hal ini akan berlangsung terus selama tidak ada kebijakan yang lebih baik daripada KJP.

Fakta yang terjadi hari ini banyak siswa yang bersekolah di sekolah negeri 50 persen muridnya berasal dari keluarga yang mampu dan gratis. Dan fakta hari ini juga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang tidak gratis tersebut, khususnya sekolah swasta grade 1,2 dan 3 seratus persen muridnya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan harus membayar (tidak gratis).

Program **sekolah gratis** ini sudah menjadi tuntutan wajib yang harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Jika program sekolah gratis ini bisa kita wujudkan di tahun 2025 nanti, maka banyak masalah dan hal yang bisa terselesaikan. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta. Tidak ada lagi anak yang harus dipulangkan dari sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah. Tidak ada lagi anak yang ijazahnya tertahan di sekolah-sekolah swasta karena orang tuanya tidak mampu melunasi tunggakan SPP di sekolah-sekolah swasta tersebut.

Program sekolah gratis ini sudah diwujudkan di beberapa daerah di wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, sekali lagi demi meningkatkan kualitas hidup atau ekonomi seseorang maka yang paling utama dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan orang tersebut. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi peluang taraf ekonomi orang tersebut. Maka sekolah gratis harus segera dipersiapkan di Perubahan APBD 2024 ini untuk kita wujudkan di tahun 2025. Maka, sejalan dengan hal tersebut, FRAKSI PARTAI GOLKAR mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan kajian khusus terkait dengan program pendidikan sekolah gratis untuk warga Jakarta bukan hanya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri tapi juga untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta khususnya grade 1,2 dan 3. **Mohon tanggapan!**

Peningkatan Mutu Pendidikan

FRAKSI PARTAI GOLKAR juga mendorong Dinas Pendidikan mengkaji semua hal-hal yang diperlukan untuk menuju sekolah gratis. Dinas pendidikan juga diminta untuk inovatif dan visioner mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan proses peningkatan mutu pendidikan di semua sekolah yang ada di DKI Jakarta mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Dengan cara program Smart School dan Smart Class Room sehingga sekolah-sekolah yang ada di Jakarta ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain yang ada di provinsi Indonesia ini.

4. Program Makan Bergizi Gratis

Terkait rencana penambahan anggaran untuk subsidi pendidikan dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024. FRAKSI PARTAI GOLKAR setuju dengan penambahan anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJMU. Penambahan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar tidak mampu yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta dan juga madrasah atau yang setingkat dengan itu. FRAKSI PARTAI GOLKAR juga mendorong Pemprov DKI Jakarta memperluas penerima manfaat tidak hanya untuk penerima KJP, tetapi juga menganggarkan untuk program makan bergizi gratis menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang telah diuji coba. Salah satunya adalah pemberian susu gratis. Program ini juga sebagai upaya menekan semakin banyaknya anak-anak yang menderita gagal ginjal akibat pola makan dan minum yang salah. **Mohon tanggapan !**

5. Masih terkait fenomena 'Bocil' mengidap diabetes-gagal ginjal pada anak akibat pola hidup yang tidak sehat tentu menjadi PR besar kita bersama. Fenomena ini harus dicegah, jangan biarkan anak-anak menjadi korban.

FRAKSI PARTAI GOLKAR mendorong Pemprov DKI segera memberikan perhatian serius dengan menggandeng rumah sakit dan puskesmas untuk layanan konsultasi gratis dan program edukasi bagi para orang tua soal pencegahan diabetes dan penyakit ginjal. **Mohon tanggapan !**

6. **Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan**

Pemprov DKI Jakarta pada rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 ini mengalokasikan anggaran dibidang kesehatan sebesar Rp. 11,3 triliun atau 20,27 % dari total Belanja Daerah diluar gaji. Alokasi anggaran tersebut harus diikuti dengan perbaikan kualitas layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu FRAKSI PARTAI GOLKAR mendorong Pemprov DKI Jakarta meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan antara lain :

- a. Memperbanyak RSUD tipe B dan C di setiap wilayah agar tidak ada lagi antrian lama di UGD yang waktu tunggu bisa 2 hari karena kamar yang ada penuh. Sehingga beban RSUD tipe A dan B dapat berkurang dengan demikian warga tidak tersiksa di UGD. **Mohon tanggapan !**
- b. Peningkatan alat-alat kesehatan di RSUD-RSUD ditingkatkan sehingga daftar tunggu pasien untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penting terkait kesehatan tidak terlalu lama. Karena alkes yang ada selama ini terbatas. **Mohon tanggapan !**

7. **Percepatan Penurunan Stunting**

FRAKSI PARTAI GOLKAR meminta keseriusan Dinas Kesehatan dalam mengupayakan penanganan balita dengan permasalahan gizi secara masif dan menyeluruh, sehingga terwujud Jakarta bebas stunting. Kami mendorong anggaran khusus stunting harus ditingkatkan. Kemudian titik stunting harus menjadi fokus kolaborasi antar dinas dan terutama sebagai penanggung jawab Dinas Kesehatan. Melakukan sinergi lintas SKPD terutama untuk pemerataan pemberian PMT, vitamin untuk usia anak sekolah dan ibu hamil secara rutin. **Mohon tanggapan !**

Berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, FRAKSI PARTAI GOLKAR juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi seluruh lokasi titik distribusi pangan murah yang menerima subsidi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Evaluasi ini penting karena banyak keluhan dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat, terkait kesulitan mendapatkan pangan yang telah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI. **Mohon tanggapan!**

8. **Pengurangan Bansos**

Terkait rencana Pemprov DKI Jakarta akan mengurangi anggaran Bansos untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp.95,53 miliar, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp.11,92 miliar, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp.4 miliar. FRAKSI PARTAI GOLKAR menyayangkan kebijakan pemangkasan anggaran dan meminta untuk dievaluasi sebelum disahkan. APBD seharusnya diprioritaskan membantu masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kami meminta penjelasan Pemprov terkait adanya pemangkasan anggaran tiga Bansos tersebut. **Mohon penjelasan!**

9. **PHK di Jakarta Melonjak**

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Jakarta merupakan kota penyumbang kasus PHK tertinggi. Bahkan pada Januari-Juni 2024 sebanyak 7.469 orang di PHK melonjak drastis hingga 994 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Pada Januari 2024, baru 20 persen dari 220.000 perusahaan yang dilakukan pengawasan. Jumlah pengawas hanya 43 orang, sehingga perlu mengembangkan aplikasi untuk melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan di perusahaan Disnakertransgi.

Angka pengangguran yang melonjak drastis ini adalah sinyal serius yang harus ditangani. Oleh karena itu, FRAKSI PARTAI GOLKAR meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan seperti monitoring, pendataan, dan validasi data tenaga kerja di seluruh perusahaan yang ada di Jakarta. Selain itu, menyediakan pelatihan dan program re-skilling untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar sesuai dengan kebutuhan industri yang sedang berkembang. Bermitra dengan perusahaan dan institusi pendidikan untuk menciptakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Kemudian mendorong sektor-sektor ekonomi baru dengan mempromosikan pengembangan industri kreatif dan digital yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Dan mendorong investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengembangan UMKM yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. **Mohon tanggapan!**

10. **Penanggulangan Banjir**

Pemprov DKI Jakarta harus segera melakukan pembebasan lahan dalam upaya penanggulangan banjir dan pengelolaan 13 sungai yang ada di

Provinsi DKI Jakarta. Berkaitan dengan pengelolaan 13 sungai di Provinsi DKI Jakarta, FRAKSI PARTAI GOLKAR mendorong agar Pemprov DKI Jakarta meminta kepada Kementerian PUPR agar 13 sungai tersebut diserahkan untuk dikelola sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Selama ini pengelolaan 13 sungai dilakukan oleh Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta hanya berperan dalam pembebasan lahan jika ada pembenahan di sekitar 13 sungai tersebut. Menurut FRAKSI PARTAI GOLKAR, sumber daya yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta cukup memadai untuk mengelola 13 sungai tersebut. Kami juga menilai bahwa inilah salah satu hal yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi oleh DKI Jakarta dalam mengatasi banjir dan sering menjadi perdebatan pihak yang harus bertanggung jawab antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, ditambah lagi tahun 2024 mendatang DKI Jakarta bukan lagi menjadi ibukota negara Republik Indonesia. **Mohon tanggapan!**

11. **Pemenuhan Kebutuhan Hunian yang Layak**

Lebih dari 60% keluarga tinggal di hunian tidak layak akibat keterbatasan lahan dan penduduk yang kian bertambah. FRAKSI PARTAI GOLKAR menilai bahwa masih ada sejumlah warga dengan KTP DKI Jakarta yang belum dapat diakomodasi dalam rumah susun. Kelompok ini terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di bawah kolong tol, warga yang telah mengalami penggusuran, warga yang tinggal di kondisi hunian yang sangat tidak layak, serta mereka yang berdomisili di area pemukiman kumuh. Bahkan, masih ada beberapa RW yang tergolong dalam kategori kumuh di Jakarta yang sampai saat ini masih memerlukan perbaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, FRAKSI PARTAI GOLKAR mengusulkan agar segera dilakukan percepatan peremajaan pemukiman, memperbanyak pembangunan rusunawa dan membangun infrastruktur dasar seperti saluran air dan peningkatan akses terhadap air bersih. **Mohon tanggapan!**

12. **Pengangkatan Guru Honorer Menjadi KKI**

FRAKSI PARTAI GOLKAR menyayangkan banyak guru honorer yang bertugas mengajar di Jakarta tetapi kesejahteraannya tak diperhatikan. Sebagian guru honorer itu bahkan mendapatkan upah yang tak layak, padahal mereka bertugas secara totalitas mengajar anak-anak atau siswa dengan baik. Maka perlu pemberian apresiasi kepada para pendidik yang merupakan garda terdepan mencerdaskan anak bangsa. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mampu untuk

memberi upah 4.127 guru dengan Kontrak Kerja Individu (KKI) yang kini masih berstatus honorer. Upah yang diberikan kepada para guru harus layak, minimal sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Oleh karena itu, tak ada lagi alasan guru honorer yang diputus kontraknya karena persoalan biaya. Karena untuk mencapai Indonesia Emas, SDM kita harus baik, siswanya wajib belajar 12 tahun secara gratis dan gurunya juga sejahtera. Tinggal political will para pembuat kebijakan agar pengangkatan guru honorer menjadi KKI segera terealisasi. **Mohon Tanggapan!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum FRAKSI PARTAI GOLKAR terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kami berharap pertanyaan, pandangan, kritik dan saran yang kami sampaikan seluruhnya mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Gubernur dan jajarannya.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, kami ucapkan terima kasih.

Izin kami penyampaikan sebuah pantun sebagai penutup :

Nelayan pergi menangkap ikan,
Hasil tangkapan melimpah ruah,
Program prioritas takkan tergoyahkan,
Menuju Jakarta yang lebih sejahtera.

*Billahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

SUARA RAKYAT, SUARA GOLKAR !!!

Jakarta, 8 Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Basri Baco, SE., MM.

Sekretaris,



Judistira Hermawan, B.Buss.



PEMANDANGAN UMUM
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa –
Partai Persatuan Pembangunan
DPRD Provinsi DKI Jakarta
terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

Disampaikan oleh:
H. S U T I K N O

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang kami hormati:

Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta Jajarannya;

Sdr. Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Serta Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, sukses dalam beraktifitas dan senantiasa membela rakyat. Amin.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, sholawat, salam serta keberkahan semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik dalam semua

aspek kehidupan. Marilah kita perbanyak bacaan Sholawat kepada Baginda Rasulullah SAW. Semoga kita kelak mendapat *syafa'atul udzma* Beliau. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Penjabat Gubernur yang sebelumnya telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Setelah mengkaji dan mendalami atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, maka Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta memandang penting untuk menyampaikan beberapa tanggapan dan catatan.

Sebagaimana telah dijelaskan saudara Gubernur bahwa Perubahan APBD DKI tahun 2024 ini mengalami kenaikan dari semula sebesar Rp85,47 triliun (delapan puluh lima koma

empat puluh tujuh triliun rupiah), naik sebesar 4,60 persen (empat koma enam persen) dibandingkan dengan Penetapan APBD tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun (delapan puluh satu koma tujuh puluh satu triliun rupiah).

Naiknya Perubahan APBD tahun 2024 ini karena adanya kenaikan Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp75,22 triliun (tujuh puluh lima koma dua puluh dua triliun rupiah) atau naik sebesar 3,83 persen (tiga koma delapan puluh tiga persen) dibandingkan dengan Penetapan APBD tahun 2024 sebesar Rp72,44 triliun (tujuh puluh dua koma empat puluh empat triliun rupiah).

Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp50,49 triliun (lima puluh koma empat puluh sembilan triliun rupiah), Pendapatan Transfer sebesar Rp24,02 (dua puluh empat koma nol dua triliun rupiah), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp702,84 miliar (tujuh ratus dua koma delapan puluh empat miliar rupiah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp44,98 triliun (empat puluh empat koma sembilan puluh delapan triliun rupiah); Retribusi

Daerah sebesar Rp666,76 miliar (enam ratus enam puluh enam koma tujuh puluh enam miliar); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp634,39 miliar (enam ratus tiga puluh empat koma tiga puluh sembilan miliar rupiah), serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp4,21 triliun (empat koma dua puluh satu triliun rupiah).

Pendapatan Transfer diharapkan sebesar Rp24,02 triliun (dua puluh empat koma nol dua triliun rupiah), berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diharapkan sebesar Rp702,84 miliar (tujuh ratus dua koma delapan puluh empat miliar rupiah), berasal dari Pendapatan Hibah.

Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer juga naik sebesar 5,09 persen (lima koma nol sembilan persen), menjadi sebesar Rp76,29 triliun (tujuh puluh enam koma dua puluh sembilan triliun rupiah) dari semula sebesar Rp72,60 triliun (tujuh puluh dua koma enam puluh triliun rupiah),

Perubahan pada Pembiayaan Daerah yang meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10,25 triliun (sepuluh koma dua puluh lima triliun rupiah) yang berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp6,54 triliun (enam koma lima puluh empat triliun rupiah) dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp3,71 triliun (tiga koma tujuh puluh satu triliun rupiah).

Adapun Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp9,17 triliun (sembilan koma tujuh belas triliun rupiah) yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7,31 triliun (tujuh koma tiga puluh satu triliun rupiah), dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1,8 triliun (satu koma delapan triliun rupiah).

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

DPRD Provinsi DKI Jakarta termasuk Fraksi PKB-PPP pada tanggal 5 Agustus 2024 telah melakukan pembahasan bersama jajaran eksekutif terkait. Selanjutnya pada Rapat Paripurna tanggal 7 Agustus 2024 kemarin telah

ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terhadap KUPA-PAS APBD Tahun 2024 oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama dan perlu mendapat tanggapan dari saudara Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

1. Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berhasil melewati target Pendapatan Daerah tahun 2024. Terlebih lagi peningkatan pendapatan daerah tersebut disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan membaiknya kinerja perekonomian di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2024 ini.

Kami meminta saudara Penjabat Gubernur beserta jajaran terkait menjaga kinerja positif ini agar mampu memberikan dampak positif terhadap penyusunan APBD tahun 2025 mendatang, sehingga postur APBD tahun 2025 mendatang mengalami peningkatan sebagaimana diharapkan.

2. Program pendidikan gratis bagi siswa sekolah swasta di Jakarta perlu segera dimatangkan, karena pendidikan gratis ini untuk pemerataan pendidikan yang merupakan hak seluruh warga Jakarta.

Selama ini banyak siswa dari keluarga kurang mampu justru tidak dapat kesempatan masuk sekolah negeri, namun ironisnya siswa tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kami minta saudara Penjabat Gubernur secepatnya mematangkan program ini dengan fokus utama memberikan pendidikan gratis terhadap siswa sekolah swasta dari keluarga tidak mampu.

3. Program normalisasi sungai Jakarta yang masih tersisa 17 kilometer. Kami minta saudara Penjabat Gubernur mendesak Kementerian PUPR untuk mempercepat normalisasi sungai yang lahannya sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Normalisasi sungai sangat vital dalam upaya mengatasi masalah banjir Jakarta, namun harus pula didukung dengan program lainnya seperti memperbanyak jumlah waduk, embung, situ untuk

menampung debit air, serta membuat tanggul penahan erosi bibir sungai, tanggul untuk mencegah terjadinya banjir rob, juga polder-polder untuk mencegah banjir di kawasan permukiman.

4. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kami minta saudara Penjabat Gubernur untuk memprioritaskan penambahan luasan RTH, karena luasan RTH di Jakarta belum mencapai 10% luas wilayah DKI atau masih jauh dari target 30% Jakarta sebagaimana amanat Undang-Undang.

Perlu diingat bahwa RTH ini berperan penting mengurangi polusi, juga berfungsi sebagai kolam penampung hujan untuk mengurangi genangan dan mencegah banjir, selain sebagai sarana wisata, edukasi, sosial dan ekologi.

5. Program penanganan sampah. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah sampah yang mencapai hamper 8.000 ton perhari sudah cukup baik. Kami minta Pemprov DKI Jakarta terbuka terhadap sistem teknologi pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan, minim dampak sosial dan lebih ekonomis. Sikap terbuka ini juga akan

menjadikan DKI Jakarta sebagai kota global yang pro investasi, pro kreatifitas dan pro lingkungan.

6. Program penanganan macet. Selain meningkatkan sarana dan prasarana transportasi umum seperti TransJakarta, harus ada upaya terpadu untuk menekan penggunaan mobil pribadi. Diantaranya mempersulit mobil pribadi parkir di luar area parkir resmi gedung perkantoran dan perbelanjaan. Baik dengan kebijakan tarif mahal maupun pengurangan secara drastis lahan-lahan parkir *street parking* yang ada selama ini. Dengan makin mahal atau susah nya parkir maka pemilik mobil akan lebih memilih transportasi umum.

Mohon tanggapan saudara Penjabat Gubernur terhadap catatan-catatan kami diatas.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Selain catatan-catatan diatas masih banyak permasalahan yang perlu dibahas lebih mendalam dari Raperda ini. Namun demikian pada prinsipnya kami dapat menerima dan menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih

lanjut oleh Dewan bersama dengan Jajaran Eksekutif terkait untuk nanti pada saatnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terimakasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Jakarta, 8 Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA –
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua



H. Hasbiallah Ilyas, S.Ag

Sekretaris



H. Sutikno